

## ANALISIS DETERMINAN KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

<sup>1</sup>Panji Papat Adhitama, <sup>2</sup>Suratno, <sup>3</sup>Edy Supriyadi  
Pemerintah Daerah Kota Depok<sup>1</sup>  
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila<sup>2,3</sup>  
E-Mail: [adhitasensei04@gmail.com](mailto:adhitasensei04@gmail.com)

(Received: 05-12-2018; Reviewed: 12-01-2019; Revised:10-03-2019 tgl-bln-thn; Accepted: 20-03-2019; Published: 31-03-2019)

### ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence quality of information on local government financial reports in the Depok City Government with an internal control system as a moderating variable. These factors include Competence of Human Resources, Regional Financial Management Information Systems and Government Accounting Standards. Type of research is quantitative research using primary data. Data collection techniques are questionnaires. Population and samples in this study are Head of Finance Subdivision, Expenditure Treasurer and financial staff and accounting compilers of financial statements as respondents, amounting to 114 of the 38 SKPDs of Depok City Government. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis with SPSS Statistics 22 software. The results showed that partially the Competence of Human Resources, Regional Financial Management Information Systems and Government Accounting Standards had a significant positive effect on the Quality of Information on Local Government Financial Reports. While the Internal Control System cannot moderate the influence between Human Resource Competencies, Regional Financial Management Information Systems and Government Accounting Standards with the Quality of Information on Local Government Financial Reports.

*Keyword : Human Resource Competencies, Regional Financial Management Information Systems, Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Quality of Information on Local Government Financial Reports*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Depok dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Faktor-faktor tersebut antara lain Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data adalah melalui penyebaran kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran serta staf keuangan dan akuntansi penyusun laporan keuangan sebagai responden yang berjumlah 114 dari 38 SKPD Pemerintah Kota Depok. Data dianalisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* dengan bantuan *software SPSS Statistics 22*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak dapat memoderasi pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Kata kunci :** Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu berupa laporan keuangan.

Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kurangnya kualitas informasi laporan keuangan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi tertentu termasuk pada pemerintah daerah di Indonesia. Informasi laporan keuangan menjadi bias ketika laporan keuangan disajikan secara tidak lengkap sehingga nantinya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Kualitas informasi laporan keuangan juga dapat menjadi tidak optimal ketika laporan keuangan tidak didukung oleh data-data secara empiris yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut menjadi tidak dapat diandalkan.

Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Fenomena yang memotivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah masih belum optimalnya kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Depok seperti :

1. Masih belum tertibnya penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Depok pada tahun 2012 yaitu Aset Tetap yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dicatat sebagai Barang Milik Daerah.
2. Neraca tidak menyajikan keseluruhan Aset Tidak Berwujud berupa aplikasi dan *software*.

Ketidaklengkapan tersebut dapat mengakibatkan informasi laporan keuangan menjadi bias (tidak dapat diandalkan) dan dapat mempengaruhi keputusan (mempengaruhi relevansi) pengguna laporan keuangan.

Untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan beberapa faktor yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman, sertifikasi, maupun uji kompetensi yang memadai. Pada Pemerintah Kota Depok, dari 38 SKPD yang ada di Kota Depok kurang lebih hanya 10 orang yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi yang memiliki tugas menyusun laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi masih rendah. Kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur SKPD dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar akan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka Kompetensi Sumber Daya Manusia yang melaksanakan sistem Akuntansi sangatlah penting.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pada Pemerintah Kota Depok terdapat suatu sistem yang dapat mengakomodasi pencatatan hingga pelaporan keuangan dalam suatu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Salah satu permasalahan dalam SIPKD diantaranya belum mampu mengakomodasi kode rekening yang sesuai dengan kebutuhan SKPD. Misalnya SKPD membutuhkan mesin jahit karung pupuk, seharusnya SIPKD dapat menyediakan kode rekening Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit tetapi

karena tidak tersedia kode rekening yang dimaksud akhirnya dimasukan kedalam kode rekening Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada tahun 2005, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis *cash toward accrual*. Selanjutnya pada tahun 2010 Pemerintah Pusat kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis *full accrual*. Perubahan basis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Dalam pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2014 pada tahun 2015, BPK menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok belum tuntas dalam mempersiapkan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dan masih ditemukan penyajian akun yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah untuk:

1. Jasa Konsultansi belum diatribusikan kedalam nilai Aset Tetap.
2. Menganggarkan dan merealisasikan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat melalui Belanja Modal (seharusnya Belanja Barang dan Jasa).

Faktor pendukung lain untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakakuratan proses Akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data Akuntansi menjadi tidak kompeten. Permasalahan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kota Depok yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu terdapat pencairan ganda sebesar Rp. 204.900.000,- dan pengesahan belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

Penelitian yang dilakukan Wibawa dan Sinarwati (2017) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng, hasilnya menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tawaqal dan Suparno (2017) yang menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Putri (2017) yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Manajemen Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian Putri didukung oleh penelitian Kesuma (2017) yang menyatakan bahwa *Good Governance*, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata.

Berdasarkan pemaparan diatas maka motivasi dilakukannya penelitian ini adalah karena masih adanya kesenjangan (*research gap*) pada hasil penelitian sebelumnya dan menggunakan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Ditemukannya pencairan ganda dalam realisasi keuangan mengindikasikan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal.
2. Penyajian Laporan Keuangan belum sesuai sepenuhnya dengan Standar Akuntansi Pemerintah dimana Aset Tidak Berwujud berupa aplikasi dan *software* tidak disajikan pada Neraca.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum memadai karena masih terbatasnya SDM yang memiliki latar belakang dibidang Akuntansi.
4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah belum mampu mengakomodir seluruh kode rekening yang dibutuhkan oleh pengguna sistem.
5. Kurangnya pengawasan oleh pejabat penatausahaan yang mengakibatkan kesalahan dalam melakukan klasifikasi belanja (biasanya antara belanja modal dan belanja barang dan jasa).
6. Belum maksimalnya peran internal audit dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan anggaran.

### **POKOK PERMASALAHAN**

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh antara penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Membuktikan dan menjelaskan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Membuktikan dan menganalisa pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Membuktikan dan menguraikan pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Membuktikan dan menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Membuktikan dan menguraikan bahwa Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh antara penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Membuktikan dan menganalisa bahwa Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Nomor 01 tentang Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan, apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Hutapea dan Thoha (2008), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang tertentu.
2. Keterampilan (*skill*) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
3. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan organisasi.

### **Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Untuk dapat mengetahui suatu sistem informasi dapat diimplementasikan dengan baik ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai sistem informasi tersebut menurut Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Sistem Aplikasi *e-Government* (2011) yaitu:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana, sarana adalah perlengkapan sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi.
2. Tingkat akurasi, akurasi yaitu mengukur ketepatan dan kemiripan hasil pada waktu yang sama dengan membandingkannya terhadap nilai standar.

3. Tingkat kesesuaian hasil, merupakan kesesuaian antara data yang diinput dengan output yang diharapkan oleh pengguna.
4. Pemeliharaan, merupakan kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut dapat bertahan lebih lama.

### **Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Afifah (2009), standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tentang :

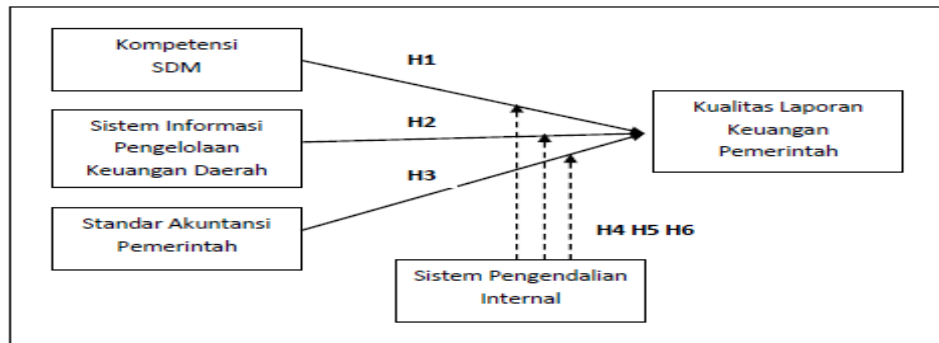
1. Pencatatan adalah kegiatan atau proses mendokumentasikan suatu aktifitas dalam bentuk tulisan diatas kertas, *file* komputer, dan lain-lain.
2. Penyajian pelaporan adalah catatan yang disajikan dalam bentuk laporan yang berisi informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut PP No. 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No. 60 tahun 2008 yaitu:

1. Lingkungan pengendalian, yaitu kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
2. Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
3. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi, informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5. Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**



Gambar 1. Hipotesis Penelitian

### **Hubungan Konseptual Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, maka pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga semakin baik.

### **Hubungan Konseptual Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Dengan demikian semakin baik pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga semakin baik.

### **Hubungan Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi yang berguna bagi penggunaannya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Sehingga laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah tersebut dapat dikatakan berkualitas.

### **Hubungan Konseptual Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penempatan pegawai yang memiliki latar belakang dibidang akuntansi untuk melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian Sistem Pengendalian Intern yang memadai dapat memperkuat Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menghasilkan keluaran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

### **Hubungan Konseptual Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh antara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap terhentinya operasi komputer dan melakukan pemeliharaan atas perangkat lunak sistem. Tindakan pengendalian tersebut dilakukan agar Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah dapat digunakan secara optimal. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal yang baik diyakini dapat memperbaiki Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

### **Hubungan Konseptual Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem Pengendalian Internal yang memadai memberikan jaminan yang lebih baik bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Dengan demikian dengan adanya Sistem Pengendalian Internal yang memadai dapat lebih meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat menghasilkan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, tindakan, dan pendapat yang mewakili populasi melalui kuesioner ataupun wawancara dengan tidak berupaya memberikan perlakuan khusus terhadap variabel dalam proses penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada bagian penatausahaan keuangan yang memiliki tugas dalam menyusun laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok yang terdiri dari 38 SKPD. Berdasarkan kriteria diatas maka responden dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan aparatur yang melaksanakan fungsi akuntansi tata usaha keuangan di masing-masing SKPD, sehingga jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 114 Orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Setyaningsih (2016) dan Trianto (2017). Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi objek penelitian. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan program SPSS 22.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengujian mencakup uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua indikator valid dan reliabel. Sedangkan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas hasilnya juga telah memenuhi kriteria *Best, Linear, Unbiased, dan Estimated (BLUE)* sehingga penelitian dapat dilanjutkan kedalam tahap pengujian hipotesis.

#### **Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)**

Uji t atau yang disebut juga dengan uji parsial digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji t pengaruh langsung dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah) terhadap variabel terikat (Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dengan hasil statistik sebagai berikut:

Tabel 1. *Analysis of Variance* Hasil Pengolahan Data



		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.645	5.433		5.089	.000		
	KSDM	.217	.109	.177	1.994	.049	.960	1.042
	SIPKD	.215	.087	.230	2.480	.015	.880	1.137
	SAP	.211	.102	.188	2.063	.041	.908	1.101

a. Dependent Variable: KLKPD

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai *p-value* variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,049 lebih kecil daripada tingkat *alpha* yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai koefisien regresi (beta) yang positif (sebesar 0,217) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Arah hubungan yang positif memberikan arti jika Sumber Daya Manusia bagian keuangan dan akuntansi pada masing-masing SKPD Pemerintah Kota Depok memiliki kompetensi yang baik, maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan juga semakin baik. Walaupun yang memiliki latar belakang dibidang Akuntansi tidak terlalu banyak (dari penyebaran kuesioner diketahui hanya 16 orang) namun demikian, rasa tanggungjawab dalam penyelesaian tugas mampu memotivasi pegawai untuk menambah pengetahuan dengan membaca artikel maupun literatur yang berhubungan dengan akuntansi dan mengikuti perkembangan akuntansi sehingga mampu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang berujung pada meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Sari dan Tamrin (2016), Wibawa dan Sinarwati (2017), Tawaqal dan Suparno (2017), Efendi dkk (2017), Pamungkas (2017), Runtuwene dkk, Pramudityo (2017), Putra dan Herawati (2017) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai *p-value* variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,015 lebih kecil daripada tingkat *alpha* yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai koefisien regresi yang positif (sebesar 0,215) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai positif menunjukkan pengaruh yang searah yaitu apabila Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembuatan laporan keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan menyebabkan peningkatan dalam hal pemrosesan transaksi menjadi lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasaan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Wibawa dan Sinarwati (2017), Putra dan Herawati (2017), Tawaqal dan Suparno (2017) dan Pramudityo (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai *p-value* variabel Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,041 lebih kecil daripada tingkat *alpha* yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai koefisien regresi yang positif (sebesar 0,211) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai positif menunjukkan pengaruh yang searah yaitu apabila Standar Akuntansi Pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan dapat diterapkan dengan baik, maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan juga semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wibawa dan Sinarwati (2017), Runtuwene dkk, Putri (2017), Wijayanti (2017), Endianto dan Kurniawan (2017) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Hasil Uji Hipotesis dengan Variabel Moderasi**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan hasil statistik sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t dengan Variabel Moderasi  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.923	5.526		4.510	.000
	KSDM	.698	1.111	.568	.626	.533
	SIPKD	.986	1.158	1.054	.851	.397
	SAP	-1.289	1.457	-1.151	-.884	.379
	KSDM.SPI	-.010	.023	-.571	-.409	.683
	SIPKD.SPI	-.017	.024	-1.126	-.698	.487
	SAP.SPI	.033	.031	1.698	1.070	.287

a. Dependent Variable: KLKPD

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai *p-value* interaksi KSDM\*SPI sebesar 0,683 lebih besar dari tingkat *alpha* yang ditetapkan sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak mampu memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kurangnya evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Depok terhadap posisi pegawai mengakibatkan pegawai di SKPD Pemerintah Kota Depok tidak ditempatkan sesuai dengan bidangnya sehingga masih kurang dalam penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan fikri dkk (2015) yang menunjukkan Sistem Pengendalian Internal tidak dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh antara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai *p-value* interaksi SIPKD\*SPI sebesar 0,487 lebih besar dari tingkat *alpha* yang ditetapkan sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak mampu memoderasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun Pemerintah Kota Depok telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan baik namun tidak didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Sistem Pengendalian Internal tersebut berupa pengendalian atas aplikasi dan pemeliharaan peralatan secara teratur. Kurangnya pengendalian atas aplikasi dan pemeliharaan peralatan mengakibatkan sering terjadinya kerusakan dan eror pada perangkat lunak dan keras.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Pratama (2017) yang menunjukkan Sistem Pengendalian Internal tidak dapat memoderasi pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai *p-value* interaksi SAP\*SPI sebesar 0,287 yang lebih besar dari tingkat *alpha* yang ditetapkan sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak mampu memoderasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, penyimpangan dalam penyajian maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku seperti terjadinya pencairan ganda yang pada akhirnya merugikan Pemerintah Kota Depok. Penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah sangat mendukung upaya peningkatan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetapi hal ini tidak terjadi pada Pemerintah Kota Depok. Hal ini tidak terlepas dari peran Inspektorat di Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan fungsinya baru dilaksanakan sebatas pengawasan melalui kegiatan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang bersifat reguler dan membuka ruang konsultasi terkait dengan masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya Inspektorat Pemerintah Kota Depok melakukan perannya sebagai pembina.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Barus (2017) yang menunjukkan Sistem Pengendalian Internal tidak dapat memoderasi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## **KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki pegawai mampu meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia sehingga mampu menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan menyebabkan peningkatan dalam hal pemrosesan transaksi menjadi lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasaan yang tinggi sehingga

akan berujung pada peningkatan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih baik.

3. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan, maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan juga semakin baik.
4. Sistem Pengendalian Internal tidak mampu memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kurangnya evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap posisi pegawai dan pelatihan yang diberikan tidak mampu meningkatkan pemahaman pegawai terhadap akuntansi dikarenakan tidak adanya dasar ilmu dari pendidikan akuntansi.
5. Sistem Pengendalian Internal tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sudah baiknya penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah namun tidak didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Kurangnya pengendalian atas aplikasi dan pemeliharaan peralatan mengakibatkan sering terjadinya kerusakan dan eror pada perangkat lunak dan keras.
6. Sistem Pengendalian Internal tidak mampu memoderasi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, penyimpangan dalam penyajian maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

## SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Depok dengan mengeluarkan aturan Kepala Daerah tentang penyelenggaraan SPIP agar menjadi prioritas dan dilaksanakan secara terus menerus sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan informasi laporan keuangan yang lebih baik.
2. Pemerintah Kota Depok dalam menempatkan SDM pada bagian akuntansi dan keuangan di tingkat SKPD disesuaikan dengan kompetensi SDM tersebut. Selain itu pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan akuntansi juga perlu ditingkatkan sehingga dapat semakin meningkatkan pemahaman SDM di bagian akuntansi dan keuangan. Pemeliharaan peralatan juga perlu dilakukan agar tidak mengakibatkan kerusakan dan eror pada perangkat lunak dan keras.
3. Bagi penelitian selanjutnya agar menambah variabel yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti peran internal audit, komitmen organisasi, pengawasan keuangan daerah atau penerapan *good governance* serta menggunakan objek penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Nomor 01 tentang Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.*

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis full accrual.*
- Afifah, N.N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Depok Tahun Anggaran 2012.*
- Barus, Syarifuddin. 2017. *Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating.* Tesis Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Depkominfo. 2011. *Cetak Biru Sistem Aplikasi E-government.*
- Efendi, dkk. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah).* Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 2, September 2017. ISSN. 2502-6976.
- Endianto, dkk. 2017. *Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Internal Audit Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bangli).* e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 8 No: 2 Tahun 2017.
- Fikri, dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd-Skpd Di Pemprov.NTB).* Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan
- Hutapea, P. dan N. Thoha. 2008. *Kompetensi Plus.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kesuma. 2017. *Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata.* Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika. Volume 141 1 Nomor 2 Desember 2017. ISSN : 2337-6686 dan ISSN-L: 2338-3321
- Pamungkas, Vita Putri. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pendapatann Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pramudityo, Bagus. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Internal audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Tegal).* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pratama, Andika. 2017. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas LKPD Dengan Variabel Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.* Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya.
- Putra dan Herawati. 2017. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas*

- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli*. e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI Vol : 8 No. 2 Tahun 2017.
- Putri, dkk. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. e-Proceeding of Management : Vol.4, No.2 Agustus 2017. ISSN : 2355-9357.
- Runtuwene, dkk. *Pengaruh Penerapan SIMDA, SAP, Motivasi Pegawai dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Artikel Ilmiah Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
- Sari dan Tamrin. 2016. *Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO.
- Setyaningsih, RR. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening*. Thesis Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tawaqal dan Suparno. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 4, (2017) Halaman 125-135. E-ISSN 2581-1002.
- Triyanto, Haerul. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Inspektorat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo)*. Skripsi Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wibawa, dkk. 2017. *Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng*. e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI. Vol: 2 No: 8 Tahun 2017.
- Wijayanti, Ratna. 2017. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017. ISSN : 2460-0585.